

## Pengaruh Ukuran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Aditia Warman<sup>1\*</sup>, Fefri Indra Arza<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

\*Korespondensi: [adityawarman18600@gmail.com](mailto:adityawarman18600@gmail.com)

### Abstract

*This study aims to determine the effect of the size local government, economic growth and capital expenditure on regional financial independence. The population of this survey for the period 2017-2021 consists of the regencies and localities located in the West Sumatra province. The current inquiry utilizes data obtained from secondary sources. Over the course of five years, a sample of nineteen districts/cities was compiled utilizing the Total Sampling technique. In order to analyze the data, multiple linear regression was applied. The study's findings indicate that regional financial independence is adversely affected by the magnitude of the local government and capital expenditures. Concurrently, regional financial autonomy is fostered by economic expansion.*

**Keywords:** *Capital expenditure; Economic growth; Regional financial independence; and Size of the local government.*

### How to cite (APA 6<sup>th</sup> style)

Warman. A., & Arza F. I. (2024). Pengaruh Ukuran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Nuansa Karya Akuntansi*, 2(2), 178-188. DOI: <https://doi.org/10.24036/jnka.v2i2.46>



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah kemandirian keuangan pada tingkat daerah. Menurut Abdul Halim (2011), hal ini berarti pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk mengumpulkan dana yang penting untuk pemeliharaan, dan pemberian layanan di tingkat daerah, dari penduduk yang telah menyetorkan pajak dan retribusi lainnya.

Sebagai metriknya, Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) menilai otonomi keuangan daerah melalui perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dan dana transfer. Nilai IKF berkisar dari nol artinya semua biaya ditanggung oleh dana transfer dan tidak ada iuran PAD hingga seratus dengan semua biaya ditanggung PAD dan tidak ada dana transfer. Akibatnya, seiring menurunnya nilai IKF, maka kemandirian daerah pun

berkurang. Sebaliknya, kemandirian fiskal mempunyai korelasi positif dengan nilai IKF (BPK-RI, 2020).

Keuangan daerah sebelum otonomi diberlakukan dan setelah keuangan daerah periode otonomi di Indonesia menunjukkan perubahan. Karena daerah memiliki kebebasan untuk mengalokasikan sumber daya keuangannya, kemandirian keuangan daerah merupakan konsekuensi dari diberlakukannya otonomi daerah. Namun dalam praktiknya, pendanaan kegiatan otonomi daerah bersumber dari uang transfer pusat yang mengalir dan tumbuh sangat cepat dari tahun ke tahun, sehingga pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal yang dilakukan sejak tahun 2004, dan kebijakan otonomi daerah yang dilakukan sejak tahun 2001, belum juga membuahkan kemandirian keuangan daerah. Hal ini tercermin dari rendahnya tingkat desentralisasi fiskal di pemerintah kabupaten/kota di Indonesia (Pusat Kajian Anggaran DPR RI, 2021).

Perihal ini sangat gampang sekali buat dibuktikan, sebab tercatat sepanjang 2 dekade terakhir jumlah dana transfer ke wilayah senantiasa saja bertambah signifikan dari Rp81,05 triliun (2001) jadi Rp812,97 triliun (2019) serta sedikit menyusut di tahun (2020) jadi Rp762,54 triliun selaku akibat pandemic covid-19. Dana transfer dari APBN setelah itu jadi sumber utama pemasukan Anggaran Pendapatan serta Belanja Daerah (APBD) yang sepanjang 2 dekade jatah rata-rata sebesar 66,81% dari total pemasukan daerah. Total Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2001 hingga tahun 2020 cuma menyumbangkan proporsi 23,67% dari pemasukan daerah (Departemen Keuangan RI, 2021).

Selain itu, berdasarkan hasil penilaian desentralisasi fiskal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada periode 2004 hingga 2020, 443 dari 503 pemerintah daerah masih tergolong kurang mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa 88,07 persen pemerintah daerah masih belum memiliki tata kelola yang mandiri. Menurut Badan Pemeriksa Keuangan, minimal 468 pemerintah daerah, yang mewakili 93,4% dari seluruh pemerintah daerah di Indonesia, menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang sama antara tahun 2013 dan 2020 (Pusat Kajian Anggaran DPR RI, 2021).

Pada tahun 2017-2021, tingkat otonomi keuangan yang dimiliki oleh kabupaten dan kota di Sumatera Barat masih belum memadai. Kabupaten dan kota di Sumbar semuanya berstatus non-mandiri yang ditunjukkan dengan rata-rata nilai IKF masing-masing sebesar 12,31%. Hal ini menunjukkan sejauh mana kabupaten dan kota di Sumbar bergantung pada bantuan pemerintah pusat.

Groves, WM Godsey, dan M.A. Shulman (2001) menggambarkan tiga kategori berbeda—variabel lingkungan, kepedulian kemanusiaan, dan pertimbangan keuangan—ketika mengkaji konsep kemandirian keuangan daerah pada era otonomi daerah. Sejumlah penelitian menguji korelasi antara atribut-atribut ini dan memastikan bahwa kinerja pemerintah daerah yang otonom secara finansial dipengaruhi oleh banyak faktor dalam skala global dan domestik. Belanja modal, besaran pemerintahan, dan ekspansi ekonomi merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi otonomi keuangan daerah.

Besar kecilnya pemerintahan daerah terbukti berdampak positif terhadap kemandirian keuangan daerah (Kuncahyono, H. 2015). Pemerintah daerah yang besar mempunyai kapasitas untuk mengawasi operasional pemerintah secara efisien dan memanfaatkan nilai aset mereka yang besar untuk meningkatkan potensi aliran pendapatan daerah.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Leny Gaghana dkk. (2018) menyelidiki korelasi antara otonomi keuangan di tingkat daerah dan pembangunan ekonomi di kabupaten dan daerah di Sulawesi Utara. Temuan ini menguntungkan. Derajat ekspansi ekonomi akan berkorelasi langsung dengan laju otonomi keuangan di suatu daerah.

Tingkat otonomi keuangan yang dimiliki suatu daerah meningkat seiring dengan pertumbuhan perekonomiannya.

Publikasi “Analisis Belanja Modal dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah” tahun 2017 oleh Sarah Normalita menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah dipengaruhi secara positif oleh belanja modal. Hal ini dikuatkan oleh penyelidikan ilmiah (Defitri, 2020) yang menghasilkan temuan serupa. Belanja modal untuk pembangunan infrastruktur daerah akan mengurangi ketergantungan daerah terhadap pembayaran transfer dan meningkatkan pendapatan daerah sehingga mendorong kemandirian keuangan daerah.

Topik ini menarik minat para peneliti karena fakta bahwa sejumlah penyelidikan sebelumnya juga menemukan inkonsistensi dalam hasil penelitian. Selama lima tahun, yaitu 2017 hingga 2021, kabupaten dan masyarakat di Sumbar dijadikan subjek penelitian dengan menggunakan analisis data panel. Pemilihan kabupaten dan daerah di Sumatera Barat sebagai lokasi penelitian membedakan penelitian ini dengan penelitian lainnya. Lebih lanjut, penelitian ini dibedakan dengan dimasukkannya dua variabel independen yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi dan ukuran pemerintahan, serta dimasukkannya tahun baru untuk penelitian.

## **REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS**

### **Teori Stewardship (*Stewardship Theory*)**

Teori manajemen, juga disebut sebagai teori penatalayanan, menggambarkan keadaan di mana seorang manajer menunjukkan penilaian yang baik, menjaga integritas dan keterbukaan dengan orang lain, dan menempatkan kebutuhan dan kepentingan prinsipal di atas kepentingannya sendiri (Davis dan Donalson, 1991). *Stewardship theory* mendefinisikan manajemen dalam konteks organisasi pemerintah sebagai pelayan yang bertanggung jawab bertindak sesuai dengan tujuan organisasi (Sanga et al., 2018). Perspektif ini konsisten dengan tujuan organisasi. Steward dipimpin oleh gagasan bahwa tindakan kooperatif yang dipandang dapat diterima secara rasional, seperti menerapkan efisiensi biaya dan meningkatkan kualitas atau kinerja, lebih menguntungkan (Raharjo, 2007).

Menurut implikasi penelitian teori *stewardship*, pemerintah daerah berperan sebagai steward dan diberi kepercayaan untuk menggunakan dana daerah untuk kepentingan pembangunan daerah sehingga dapat lebih mandiri secara finansial. Dalam pengelolaan daerah, pemerintah daerah berperilaku logis, didorong oleh kepercayaan (*stewardship*) bukan kepentingan atau ambisi pribadi dan dengan tujuan yang sama dengan prinsipal. Penting juga untuk fokus pada seberapa baik pemerintah daerah mampu mengelola pendapatan daerah untuk mendorong belanja modal dan pertumbuhan ekonomi, hal ini akan mendorong kemandirian keuangan daerah. Pemerintah daerah harus menggunakan metode pemerintah untuk memobilisasi sumber daya mereka, terutama dengan menerapkan manajemen yang efektif secara kolaboratif dan kooperatif. Jika aset daerah, pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal dikelola dengan baik maka kemandirian finansial akan meningkat.

### **Ukuran Pemerintah**

Ukuran pemerintah menggambarkan seberapa besar aset yang dimiliki oleh suatu daerah. Ukuran pemerintah dihitung dari total aset daerah pada kurun waktu tertentu. Pemerintah daerah dapat meningkatkan infrastruktur dan fasilitas untuk melayani masyarakat dengan lebih baik jika mereka mendapatkan aset keseluruhan yang cukup besar. Diharapkan kualitas pelayanan yang ditawarkan kepada masyarakat dari aset

yang dimiliki semakin meningkat seiring bertambahnya ukuran pemerintah daerah (Kuncahyono, 2015).

### **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi adalah proses di mana kegiatan ekonomi meningkatkan jumlah produk dan jasa yang dihasilkan dalam masyarakat serta kekayaannya. Pembangunan ekonomi yang besar merupakan harapan bagi seluruh negara, dan diharapkan suatu negara akan semakin terampil dalam memproduksi barang dan jasa (Pujoalwanto, 2014). Pertumbuhan ekonomi, seperti dijelaskan di atas, adalah kemampuan suatu negara untuk meningkatkan PDB (Produk Domestik Bruto) dalam jangka panjang untuk menghasilkan lebih banyak komoditas dan jasa yang akan dimanfaatkan dan dihargai oleh penduduknya.

### **Belanja Modal**

Belanja modal berkaitan dengan pengeluaran yang terjadi selama proses pembentukan modal, dengan tujuan khusus untuk menambah aset tetap atau inventaris yang menghasilkan keuntungan dalam beberapa periode akuntansi. Klasifikasi ini mencakup pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan pembayaran pemeliharaan, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas aset, selain untuk menjaga atau memperpanjang masa manfaatnya (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010).

### **Kemandirian Keuangan Daerah**

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kapasitas pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana yang diperlukan untuk operasi mereka sendiri, perluasan, dan penyediaan layanan kepada konstituen yang membayar pajak. Rasio kemandirian menunjukkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan luar. Rasio kemandirian juga mencerminkan indikator keterlibatan masyarakat untuk pembangunan daerah, seperti membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan unsur utama PAD (Halim, 2007).

### **Hubungan Antar Variabel Dan Pengembangan Hipotesis**

#### ***Pengaruh Ukuran Pemerintah Terhadap Kemandirian Keuangan***

Menurut penelitian yang dilakukan Pratiwi (2016), hubungan antara kemandirian keuangan suatu daerah dengan dimensi tata kelola pemerintahannya adalah positif dan dipengaruhi oleh besar kecilnya daerah. Diharapkan bahwa pemerintah daerah, dengan bantuan pendanaan warisan mereka, akan memperluas jangkauan dan kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara memadai di tahun-tahun mendatang. Hal ini akan memberdayakan pemerintah daerah untuk beroperasi secara lebih efisien dengan memanfaatkan sumber daya dan infrastruktur yang dimiliki oleh pemerintah. Adanya anggapan bahwa besarnya pemerintahan berdampak positif terhadap tingkat otonomi keuangan di tingkat daerah. Hipotesis berikut dapat disimpulkan:

H1: Ukuran Pemerintahan Berpengaruh Positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

#### ***Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemandirian Keuangan Daerah***

Penelitian yang dilakukan oleh Gaghana dkk. (2018) bertujuan untuk menguji hubungan perkembangan ekonomi daerah dengan kemandirian keuangan daerah. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap daerah yang mandiri finansial,

menurut temuan tersebut. Kesadaran masyarakat terhadap kewajiban menyetorkan pajak dan retribusi daerah secara langsung dipengaruhi oleh pesatnya pertumbuhan perekonomian suatu masyarakat. Sebagai sumber pembiayaan, pendapatan pajak daerah dihasilkan sebagai respons terhadap kuatnya ekspansi ekonomi masyarakat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Situasi dimana kemandirian keuangan daerah dipengaruhi oleh ekspansi ekonomi. Hipotesis berikut dapat disimpulkan dari ini:

H2: Pertumbuhan Ekonomi Berpengaruh Positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

### ***Pengaruh Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah***

Korelasi antara kemandirian keuangan daerah dan analisis belanja modal diteliti dalam penelitian yang dilakukan oleh Sarah Normalita (2017). Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kemandirian daerah. Kemandirian keuangan daerah akan dipengaruhi oleh belanja modal yang akan meningkatkan pendapatan daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap pembayaran transfer. Hal ini berkaitan dengan asumsi yang mendasari bahwa belanja modal mempunyai pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Dari sini dapat disimpulkan hipotesis berikut:

H3: Belanja Modal Berpengaruh Positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Website Direktorat Perimbangan Keuangan ([djpk.kemenkeu.go.id](http://djpk.kemenkeu.go.id)), Badan Pusat Statistik Sumbar, dan Laporan Pendapatan dan Belanja Daerah (LRA) Kabupaten/Kota di Sumbar yang telah diperiksa BPK, asal data sekunder digunakan dalam penelitian ini. Populasi penelitian ini adalah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017 hingga 2021. Dengan menggunakan sampling komprehensif/total sampling, sampel dipilih sebanyak sembilan belas kabupaten/kota dalam kurun waktu lima tahun.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Statistik Deskriptif**

Berikut hasil uji analisis deskriptif yang dilakukan terhadap masing-masing variabel:

**Tabel 1**  
**Analisis Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kemandirian Keuangan Daerah	95	0.040000	0.360000	0.121895	0.062829
Ukuran Pemerintah	95	11.88633	12.89298	12.23241	0.197319
Pertumbuhan Ekonomi	95	18140.58	51511.08	31549.18	8432.937
Belanja Modal	95	0.01000	0.35000	0.192947	0.064145

Tabel 1 menjelaskan bahwa rata-rata (mean) dari ukuran pemerintah pada 19 sampel kabupaten/kota selama 5 tahun ialah 12.23241 dengan nilai ukuran pemerintah tertinggi (maksimal) sebesar 11.88633. Berdasarkan standar deviasi yang dihitung

sebesar 0,197319, dapat disimpulkan bahwa distribusi ukuran pemerintah relatif stabil dan konsisten dengan nilai mean.

Rata-rata (mean) pertumbuhan ekonomi di 19 kabupaten disajikan secara rinci pada Tabel 1. Kota dengan nilai pertumbuhan ekonomi tertinggi selama lima tahun adalah 31549,18 (puncak 51511,08). 8432.937 merupakan simpangan baku yang tersisa. Fakta bahwa nilai ini mempunyai kapasitas lebih banyak dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa distribusi pertumbuhan ekonomi sangat fluktuatif.

Rata-rata (standar deviasi) belanja modal di 19 kabupaten/kota disajikan secara rinci pada Tabel 1. Untuk jangka waktu lima tahun, avarenge nilai belanja modal adalah 0,192947 dengan nilai maksimum sebesar 0,35000. 0,064145 merupakan sisa simpangan baku atau deviasi. Nilai observasi yang di bawah rata-rata menunjukkan adanya sedikit variabilitas dalam distribusi dana belanja modal.

## Uji Pemilihan Model

### *Uji Chow*

Hasil uji Chow yang ditampilkan pada Tabel 2 menampakkan angka probabilitas  $0,0000 < 0,05$ . Kejadian ini menggambarkan pemilihan Model Efek Tetap. Anda kemudian diminta untuk menyelesaikan Tes Hausman.

**Tabel 2**  
**Uji Chow**

Redundant Fixed Effects Tests  
Equation: Untitled  
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	34.357956	(18,73)	0.0000
Cross-section Chi-square	213.590550	18	0.0000

### *Uji Hausman*

**Tabel 3**  
**Uji Hausman**

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled  
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	19.681124	3	0.0001

Seperti terlihat pada Tabel 3, nilai probabilitas uji Hasuman sebesar  $0,0360 < 0,05$ . Hal ini menandakan pemilihan paradigma fixed effect. Oleh karena itu, diperlukan pengujian hipotesis klasik.

**Uji Asumsi Klasik**  
**Uji Multikoloniaritas**

**Tabel 4**  
**Uji Multikoloniaritas**

	LOG(X1)	X2	X3
LOG(X1)	1.000000	0.097102	-0.003485
X2	0.097102	1.000000	0.361523
X3	-0.003485	0.361523	1.000000

Hasil uji multikoloniaritas menunjukkan tidak adanya hubungan signifikan  $>0,8$  antara variabel independen dan dependen. Akibatnya, data yang dipakai terhadap penyelidikan ini gagal memenuhi dugaan klasik mengenai multikoloniaritas.

**Uji Heteroskedastisitas**

Nilai  $r^2$  teramati maupun hasil uji heteroskedastik keduanya melebihi tingkat kesalahan ( $>0,05$ ). Hal ini menandakan penelitian yang dipertimbangkan tidak menunjukkan heteroskedastisitas dan tidak memenuhi asumsi klasik.

**Tabel 5**  
**Uji Heteroskedastisitas**

Dependent Variable: RESABS  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 10/02/23 Time: 01:35  
 Sample: 2017 2021  
 Periods included: 5  
 Cross-sections included: 19  
 Total panel (balanced) observations: 95

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.010274	0.066680	-0.154078	0.8779
LOG(X1)	0.000834	0.002362	0.353177	0.7248
X2	0.020298	0.031637	0.641595	0.5227
X3	-0.004624	0.017857	-0.258970	0.7962

**Uji Statistik : Multiple Regression**  
**Uji Koefisien Determinasi**

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Adjusted R-squared	0.91222
--------------------	---------

Data pengujian tersebut menghasilkan nilai Adjusted R-squared sebesar 0,912349 yang dilambangkan dengan Adjusted R<sup>2</sup>. Berdasarkan perkiraan tersebut, dampak gabungan belanja modal, pertumbuhan ekonomi, dan ukuran pemerintah terhadap kemandirian keuangan daerah adalah sebesar 91,23 persen. Sisanya sebesar 8,77% dapat dikaitkan dengan faktor tambahan yang diabaikan dalam penelitian atau dihilangkan dari model.

## Uji Simultan

**Tabel 7**  
**Uji Simultan**

F-Statistik	0.0000
-------------	--------

Uji simultan tersebut memperoleh angka signifikansi sebanyak 0,000, tidak-lebih dari ambang batas yang dipatokkan yaitu 0,05. Nilai tersebut menandakan ternyata ukuran pemerintah, belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

### Uji Hipotesis

Nilai sig 0.0051 diperoleh ketika hipotesis ukuran pemerintah diuji. Hal ini menandakan H<sub>0</sub> ditolak dan digantikan oleh H<sub>a</sub>; dengan demikian, validitas hipotesis pertama ditetapkan. Hal ini menyoroti dampak signifikan skala pemerintah terhadap tingkat otonomi keuangan di wilayah Sumatera Barat.

**Tabel 8**  
**Hasil Uji Hipotesis**

Variabel	T-Statistik	Sig
Ukuran Pemerintah (X1)	-2.88894	0.0051
Pertumbuhan Ekonomi (X2)	0.291995	0.7711
Belanja Modal (X3)	-0.55281	0.5821

Hipotesis kedua yang memasukkan variabel pertumbuhan ekonomi didukung oleh nilai sig sebanyak 0.7711, karenanya H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>a</sub> ditolak. Kesimpulannya, tidak ada hubungan signifikansi pertumbuhan ekonomi dengan kemandirian keuangan daerah di Sumbar.

Hipotesis ketiga menyatakan tidak mempunyai hubungan signifikansi belanja modal dengan kemandirian keuangan daerah di Sumatera Barat yang ditunjukkan dengan nilai sig sebanyak 0.5821 untuk variabel belanja modal. Dengan demikian H<sub>0</sub> diterima, sedangkan H<sub>a</sub> ditolak.

## Pembahasan

### *Pengaruh ukuran pemerintah terhadap kemandirian keuangan daerah*

Penelitian ini mengevaluasi besaran pemerintahan melalui penerapan persamaan regresi berganda dan total aset. Nilai t sebesar -2,88894, koefisien regresi -0,085960, dan nilai sig 0,0051. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan negatif secara statistik skala pemerintahan dengan kemandirian keuangan daerah ( $0,0051 < 0,05$ ). Koefisien regresi sebesar -0,085960. Oleh karena itu, besarnya pemerintahan daerah, belum tentu berarti otonomi fiskal di daerah. Hal ini mungkin menjelaskan korelasi negatif antara daerah dengan kekayaan bersih tinggi dan kemandirian keuangan daerah.

Berbeda dengan temuan Pratiwi, N. (2016), Kunchayono, H. (2015), dan Imawan, R., & Wahyudin, A. (2014) yang menunjukkan bahwa besaran pemerintahan berpengaruh positif terhadap otonomi keuangan daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan sebaliknya. Terdapat penekanan yang kuat terhadap perlunya daerah dengan warisan yang banyak untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dengan memanfaatkan aset yang mereka miliki.

Namun studi ini menunjukkan bahwa otonomi daerah tidak dipengaruhi oleh kesejahteraan secara keseluruhan. Minimnya korelasi antara besaran tata kelola daerah



dengan otonomi keuangan daerah menunjukkan bahwa potensi sumber daya yang cukup besar untuk meningkatkan otonomi keuangan daerah belum sepenuhnya terealisasi. Hal ini mungkin disebabkan oleh jumlah aset yang tidak efektif yang berlebihan (Minarsih, R. A. 2015). Berinvestasi pada real estat atau kendaraan yang gagal menghasilkan keuntungan melalui perolehan pendapatan jangka panjang dianggap sebagai aset yang kurang produktif.

### ***Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemandirian keuangan daerah***

Kenaikan ekonomi dievaluasi riset ini dengan persamaan regresi berganda dan rasio PDRB. Nilai yang diperoleh dari uji t pertumbuhan ekonomi sebesar 0,291995. Koefisien regresi yang terkait dengan nilai ini adalah 0,017881, dan tingkat signifikansinya adalah 0,7711. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hipotesis awal mengenai kemandirian keuangan daerah memang berdampak positif, namun hipotesis tersebut kurang memiliki signifikansi statistik ( $\text{sig.} > \alpha (0,05)$ , khususnya  $0,7711 > 0,05$ ), sebagaimana ditunjukkan oleh koefisien regresi sebesar 0,017881.

Pertumbuhan ekonomi daerah dengan agregat PDRB, menjamin kemandirian finansial. Pengamatan ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian finansial suatu daerah sebanding dengan laju pembangunan ekonominya.

Berbeda dengan kesimpulan Laoli Puspita dkk. (2020), hasil penelitian ini konsisten dengan study Leny Gaghana dkk. (2018) yang menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi berdampak positif terhadap kemandirian finansial daerah.

### ***Pengaruh belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah***

Belanja modal dalam analisis ini dihitung melalui perbandingan belanja modal dan belanja daerah, dengan menggunakan persamaan regresi berganda. Nilai t untuk belanja modal yang ditentukan melalui uji t sebesar -0,55281. Koefisien regresi -0,023747 dan nilai sig 0,5821. Kemandirian keuangan daerah tidak tegak lurus terhadap kapasitas belanja modal, yang diukur dengan rasio belanja daerah, menurut temuan ini.

Penelitian ini justru menunjukkan kebalikan dari kesimpulan Sarah Normalita (2017) dan Defitri (2020), yakni kemandirian keuangan daerah dipengaruhi positif oleh belanja modal. Namun demikian, hasil ini lurus dengan kesimpulan Darwis (2015) yang menyebutkan pembangunan modal dalam jumlah besar berdampak buruk terhadap otonomi keuangan daerah. Terjadinya fenomena ini mungkin disebabkan oleh kesenjangan belanja modal daerah yang pada akhirnya melemahkan otonomi keuangan. Gagasan tersebut didukung Malau et al. (2020), yang juga menyatakan bahwa terdapat hubungan terbalik belanja modal dan tingkat otonomi keuangan antar daerah.

## **SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Kemandirian keuangan daerah dipengaruhi secara positif namun tidak signifikan secara statistik oleh perubahan pertumbuhan ekonomi; sebaliknya, kemandirian keuangan daerah terkena dampak negatif dan signifikan akibat perubahan ukuran pemerintahan. Selanjutnya kemandirian keuangan daerah dipengaruhi secara negatif dan signifikan secara statistik oleh variabel belanja modal.

### **Keterbatasan**

Meskipun perencanaan dan pelaksanaannya dilakukan dengan cermat, peneliti mengidentifikasi hal-hal berikut sebagai keterbatasan penelitian : a) Nilai R<sup>2</sup> yang disesuaikan adalah 0,91222, yang menunjukkan bahwa variabel independen menyumbang 91,2% varians variabel dependen. Oleh karena itu, terdapat beberapa

variabel tambahan yang berpotensi mempengaruhi otonomi keuangan daerah. b) Penelitian dilakukan di kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat antara tahun 2017 dan 2021. Oleh karena itu, karena adanya variasi yang spesifik di setiap daerah, hasil yang diperoleh mungkin berbeda dengan penelitian yang dilakukan di daerah lain.

### **Saran**

Saran-saran berikut ini dapat menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya: a) Untuk mencapai hasil yang lebih unggul dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya, sebaiknya dilakukan pemilihan variabel dan data alternatif, memperbanyak jumlah observasi penelitian, dan menyempurnakan model regresi alternatif. b) Mencoba memasukkan dan menganalisis variabel-variabel eksternal tambahan yang berpotensi berdampak pada otonomi keuangan suatu daerah. c) Berusaha meningkatkan operasionalisasi variabel tambahan melalui penggabungan variabel moderasi atau kontrol.

### **Daftar Pustaka**

- Abdul, Halim. (2011). PENGENDALIAN KEUANGAN DAERAH. Edisi 3. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Andriana Nina. (2020). *PENGARUH DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA MODAL TERHADAP KEMANDIRIAN DAERAH*.
- Basuki. 2016. *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis :Dilengkapi Aplikasi SPSS & Eviews*. Jakarta: Rajawali Press.
- BPK-RI. (2020). Reviu atas kemandirian fiskal pemerintah daerah tahun anggaran 2018 dan 2019. *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 - Laporan Hasil Reviu Atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 Dan 2019*.
- Darwis. (2015). *PENGARUH BELANJA MODAL DAN BELANJA PEGAWAI TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT*.
- Defitri, S. Y. (2020). Pengaruh Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 19(2), 107–119.
- Dina Apriana, R. S. (2010). ANALISIS HUBUNGAN ANTARA BELANJA MODAL PENDAPATAN ASLI DAERAH, KEMANDIRIAN DAERAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH. *Jurnal Akuntansi & Investasi*, Vol. 11 No. 1, 68–79.
- Firmansyah, I. (2017). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah Di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011-2015.
- Gomes, R. C., Alfinito, S., & Albuquerque, P. H. M. (2013). Analyzing local government financial performance: evidence from Brazilian municipalities 2005-2008. *Revista de Administração Contemporânea*, 17(6), 704-719.
- Gujarati, Damodar dan Dawn C Porter. 2003. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Rineka cipta.
- Gujarati Damodar, N. 2006. *Dasar-Dasar Ekonometrika. Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Leny Gaghana, R., Kindangen, P., & Rotinsulu, D. C. (2018). PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DI SULAWESI UTARA (STUDI KASUS PADA KOTA MANADO, KOTA BITUNG, KOTA TOMOHON DAN KOTA KOTAMOBAGU). In *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah* (Vol. 19, Issue 3).

- Machfud, A. N. (2020). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DANA OTONOMI KHUSUS DAN TINGKAT KEMISKINAN TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI ACEH. *Jurnal Manajemen Indonesia, Vol.5 No 1*.
- Malau, E. I., Pratiwi, E., & Parapat, S. (2020). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN BELANJA MODAL TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH. *Jurnal EK&BI, 3*, 2620–7443.
- Maya Novitasari, L. N. (2019). PENGARUH PAJAK, RETRIBUSI, DBH, BELANJA MODAL, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KEMANDIRIAN DAERAH. *INVENTORY: Jurnal Akuntansi, Vol.3 No.2*.
- Pratiwi, N. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kemandirian Keuangan serta Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia (Doctoral dissertation, STIE YKPN).
- Pusat Kajian Anggaran DPR RI. (2021). *Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Pembiayaan Kreatif*.
- Puspita Laoli, R., Valentinus Situmorang, F., & Rojeston Marnaek Nainggolan, B. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara). *JIMEA, 4(3)*.
- Saleh, R. (2020). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. *JURNAL INFORMASI, PERPAJAKAN, AKUNTANSI, DAN KEUANGAN PUBLIK, 15(2)*, 111–134.
- Sarah Normalita, I. M. (2017). Accounting Analysis Journal Analysis of Capital Expenditure and Its Implications on Local Financial Independence. *AAJ, 6 (2)*.
- Tahar A. (2011). *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANAALOKASI UMUM TERHADAP KEMANDIRIAN DAERAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH*.
- Tessa Lonica Karouw, D. S. M. E. K. D. T. (2022). PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH DAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DIKOTA MANADO. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Volume 22 No.4*.
- Tolosang, K. D. (2018). PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KOTA TOMOHON. In *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi (Vol. 18, Issue 03)*.
- Tri Haryanto Joko. (2018). *KEMANDIRIAN DAERAH DAN PROSPEK EKONOMI WILAYAH KALIMANTAN*